



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh

**Safira Dini Nur Aini  
NIM. 150810101187**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Safira Dini Nur Aini  
NIM. 150810101187**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Asih Faqihanah Fiddin dan Ayahanda Moh. Khoiri tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Saudaraku Putri Maulinda Izzatul Jannah yang telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis.
3. Guru-guru tercintaku dari sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Sesungguhnya allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(Surat Ar-Ro'd ayat 11)

“Sebaik-baik harapan manusia adalah seorang mu'min yang memperhatikan perkara dunianya dan perkara akhiratnya”

(HR.Ibnu Majjah)



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safira Dini Nur Aini

NIM : 150810101187

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 28 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Safira Dini Nur Aini  
NIM.150810101187

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

Safira Dini Nur Aini

150810101187

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Endah Kurnia, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi: Pengaruh Rasio PAD dan Rasio Dana Perimbangan terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Nama : Safira Dini Nur Aini  
Nim : 150810101187  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 28 Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E.  
NIP. 197804142001122003

Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.  
NIP. 195812061986031003

Mengetahui,  
Kordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.  
NIP. 197207131999031001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Safira Dini Nur Aini

NIM : 150810101187

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

05 Juli 2019

Dan dinyatakan telah memnuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim, M.Si. (.....)  
NIP. 196507301991032001
2. Sekertaris : Drs. P. Edi Suswendi, MP. (.....)  
NIP. 195504251985031001
3. Anggota : Dr. Agus Luthfi, M.Si. (.....)  
NIP. 196505221990021001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Midad, S.E., M.M., Ak., CA.  
NIP. 19710727 1995512 1001



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Safira Dini Nur Aini**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian keuangan di daerah. Kemandirian keuangan daerah sendiri dapat dicerminkan melalui persentase perolehan PAD yang tinggi terhadap total penerimaan daerah. Dimana dengan adanya kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang ada di daerah. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan alat analisis panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Wilayah.

*THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND EQUALIZATION FUNDS ON  
ECONOMIC GROWTH AND PROVERTY IN REGENCY/CITY OF NUSA  
TENGGARA TIMUR PROVINCE*

**Safira Dini Nur Aini**

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*Fiscal decentralization is a policy made by the government to reduce fiscal dependence on the central government and create financial independence in the region. The independence of regional finance itself can be reflected through the high percentage of PAD revenue to total regional revenues. Where the existence of regional financial independence is expected to help implement regional development that can affect economic growth and poverty in the region. The purpose of this study was to determine the relationship of the level of regional financial independence to economic growth and poverty of districts / cities in Nusa Tenggara Timur Province in 2012-2017. The results of study uses secondary data analysis tools to approach the data panel Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that the local revenue had significant positive effect on economic growth and local revenue had no significant negative effect on provety, equalization funds had no significant positive effect on economic growth and equalization funds had significant negative on provety.*

*Keywords: Local Revenue, Economic Growth, Poverty, Region.*

## RINGKASAN

Setiap proses pembangunan memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mulai memasuki era baru setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri merupakan salahsatu usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan yang lebih intensif di daerah-daerah. Kebijakan otonomi daerah ini dibarengi dengan desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara berkembang dimana didalamnya masih berisi dengan pembangunan perekonomian. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya guna keperluan pembangunannya.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal dapat di indikasikan melalui tingkat kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan pelalui peningkatan perolehan PAD. Sedangkan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor peningkatan perolehan PAD, pengukuran kinerja tersebut dapat berupa rasio keuangan keuangan yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban daerah dalam perhitungan APBD. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah sertarasio kemandirian daerah menjadi indikator baik tidaknya kinerja pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002).

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory reseach* yang menjelaskan hubungan antar variabel dependen dan independen. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian adalah di 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2012-2017. Adapun sumber data diperoleh dari DJPK, BPS NTT, RPJMD NTT, buku literature, jurnal penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel dependen Rasio PAD dan Rasio Dana Perimbangan dengan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Serta, seberapa besar pengaruh antara variabel dependen Rasio PAD, Rasio Dana Perimbangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan variabel independen yaitu Kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder yaitu berupa data panel dengan menggunakan alat analisis Eviews 9. Data panel adalah data gabungan dari data

*time series* dan data *cross section*. Dimana penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Model. Uji statistik yang digunakan adalah pengujian parsial(Uji-t), pengujian Simultan (Uji F) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Adapun uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian pada persamaan pertama menunjukkan bahwa Rasio PAD dengan nilai probability 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien 13306.72 artinya setiap kenaikan 1% rasio PAD akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 1 717.28 miliar. Rasio Dana Perimbangan memiliki nilai probability sebesar 0.4833 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dengan nilai koefisien 793.5997 artinya rasio Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil penelitian pada persamaan kedua menunjukkan bahwa rasio PAD dengan nilai probability 0.0886 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dengan nilai koefisien -15.27696 artinya setiap kenaikan 1% rasio PAD tidak berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rasio Dana Perimbangan memiliki nilai probability sebesar -19.78049 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dengan nilai koefisien -19.78049 artinya setiap kenaikan 1% rasio Dana Perimbangan akan mengurangi persentase penduduk miskin sebesar -19,78 % per tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai probability 0.0052 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dengan nilai koefisien 0.224331 artinya setiap kenaikan 1% Tingkat Pengangguran Terbuka akan menambah persentase penduduk miskin 0.22% per tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah dan rasio dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017. Serta rasio Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Rasio dana dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Povinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017.

## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur”* skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E.,M.E. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Badjuri, M.E dan Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Dr. Muhammad Midad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Riniati, M.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibunda Asih Faihanah Fiddin dan Ayahanda Moh. Khoiri yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Adikku Putri Maulinda Izzatul Jannah terimakasih sudah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
9. Angga Riyan Fredianto terimakasih telah memberikan dukungan, doa, motivasi dan menjadi penghibur disaat penulis mulai lelah dengan segala tugas yang akan diselesaikan.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan ditugasan Tyas Fabiandini, Indra Dwi Afif dan Elsy Wury terimakasih atas motivasinya.
11. Keluarga besar PPM SYAFI'UR ROHMAN khususnya kepada putri, tsintani, dhistan, sylve, norma, nuril, karin, ayu oka, metri dan angkatan 2015.
12. Terimakasih kepada Teman-teman yang selalu mengisi hari-hari dengan canda tawa selama diperkuliahan dan memberikan motivasi serta dorongan kelulusan penulis (Keluarga BEN TO) Dimas Tri Anggara, M. Rizky Hidayatullah dan Arif Faqi Rohman.
13. Terimakasih kepada Shofiaturrohmah, Nina Absaria dan Elya Sintya yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman ilmu ekonomi dan studi pembangunan angkatan 2015 terimakasih banyak motivasi dan semangatnya.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan andil dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah anda berikan. Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis juga menerima saran serta kritik demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga dapat memeberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, 28 Mei 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN</b> .....	v
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Kajian Teori</b> .....	10
2.1.1 Konsep Penerimaan Negara.....	10
2.1.2 Konsep Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	11
2.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	16
2.1.4 Konsep Kemiskinan Ragnar Nurkse.....	18
2.1.5 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	19
2.1.7 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan.....	20
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	21



<b>2.3 Kerangka Konseptual</b> .....	27
<b>2.4 Hipotesis penelitian</b> .....	29
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	30
<b>3.1 Rancangan Penelitian</b> .....	30
3.1.1 Jenis Penelitian .....	30
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.1.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.1.4 Populasi dan Sampel.....	31
<b>3.2 Metode Analisis Data</b> .....	32
3.2.1 Analisis Data Panel.....	32
<b>3.3 Pemilihan Model Data Panel</b> .....	36
<b>3.4 Uji Asumsi Klasik</b> .....	37
3.4.1 Uji Normalitas .....	37
3.4.2 Uji Multikolinearitas.....	37
3.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	37
<b>3.5 Pengujian Hipotesis</b> .....	37
<b>3.6 Definisi Variabel Operasional</b> .....	41
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
<b>4.1 Gambaran Umum</b> .....	42
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	42
4.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	43
4.1.3 Keadaan Penduduk dan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	44
<b>4.2 Deskripsi Variabel Penelitian</b> .....	46
4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto.....	46
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	47
4.2.3 Dana Perimbangan.....	48
4.2.4 Tingkat Kemiskinan.....	49
4.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	51
<b>4.3 Hasil</b> .....	53
4.3.1 Hasil Regresi Panel.....	53
<b>4.4 Uji Statistik</b> .....	58

4.4.1 Uji Statistik Pertumbuhan Ekonomi.....	59
4.4.2 Uji Statistik Persentase Penduduk Miskin .....	61
<b>4.5 Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>64</b>
4.5.1 Uji Asumsi Klasik Pertumbuhan Ekonomi .....	64
4.5.2 Uji Asumsi Klasik Persentase Penduduk Miskin .....	66
<b>4.6 Pembahasan.....</b>	<b>68</b>
4.6.1 Pengaruh Rasio PAD dan Rasio Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	68
4.6.2 Pengaruh Rasio PAD dan Rasio Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan.....	75
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>81</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Komposisi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017.....	6
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	43
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (Jutaan Rupiah) .....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur.....	45
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Nusa Tenggara Timur .....	45
Tabel 4.5 PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2017.....	47
Tabel 4.6 Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2012-2017 .....	51
Tabel 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2017.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow Tes.....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman .....	55
Tabel 4.10 Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effec .....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Tes.....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Hausman .....	57
Tabel 4.13 Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effec .....	57
Tabel 4.14 Hasil Uji F Effect Specification Cross-section fixed.....	59
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji R .....	61
Tabel 4.17 Hasil Uji F Effect Specification Cross-section fixed.....	61
Tabel 4.18 Hasil Uji t.....	62
Tabel 4.19 Hasil Uji R .....	63
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65

Tabel 4.22 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	67



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2017 .....	4
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 4.1 Perkembangan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2017 .....	48
Gambar 4.2 Perkembangan alokasi Dana Perimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2017 .....	49
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	65
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	68
Gambar 4.5 Perkembangan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017 .....	70
Gambar 4.6 Komposisi Perolehan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017 .....	71
Gambar 4.7 Komposisi Realisasi Dana Perimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017.....	73
Gambar 4.8 Realisasi Perolehan Dana Perimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2012-2017.....	74

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017.....	89
2. Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017.....	90
3. Data yang Digunakan Dalam Penelitian .....	92
4. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	95
4.1 Hasil Chow (Chow – test).....	96
4.2 Hasil Uji Hausman (Hausman – test).....	96
5.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	97
5.2 Hasil Uji Normalitas .....	97
5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	97
6. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model .....	98
7.1 Hasil Chow (Chow – test).....	99
7.2 Hasil Uji Hausman (Hausman – test).....	99
8.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	100
8.2 Hasil Uji Normalitas .....	100
8.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	100

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mulai memasuki era baru setelah dilaksanakan kebijakan otonomi daerah dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam mengatur tanggung jawab lebih terhadap pemerintah daerah dalam memenuhi kepentingan masyarakat daerahnya sendiri, baik dalam urusan politik, ekonomi dan sosial budaya daerahnya. Kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung jawab yang besar terhadap pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik, yang pada awalnya di sediakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ataupun lembaga. Selain itu, disisi lain pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengelola penerimannya.

Meskipun demikian, dengan adanya kebijakan otonomi daerah bukan berarti pemerintah pusat membiarkan pemerintah daerah untuk mengelola begitu saja. Pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam memberikan dana kepada daerah yang bertujuan sebagai redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi di antar-daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, kebijakan otonomi daerah di dukung oleh perimbangan dana antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 memberikan kekuatan baru dalam otonomi pemerintah daerah. Dalam UU tersebut yang dimaksud mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan yang diperlukan daerah dapat sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk mengelola dan pengawasan

keuangannya (Saragih, 2003). Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat dicirikan dengan adanya desentralisasi fiskal, dimana dalam perumusan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tanggung jawab tersendiri bagi daerah-daerah. Tujuan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Enceng *et al* (2012) Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sesuai dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat (Rochjadi, 2006).

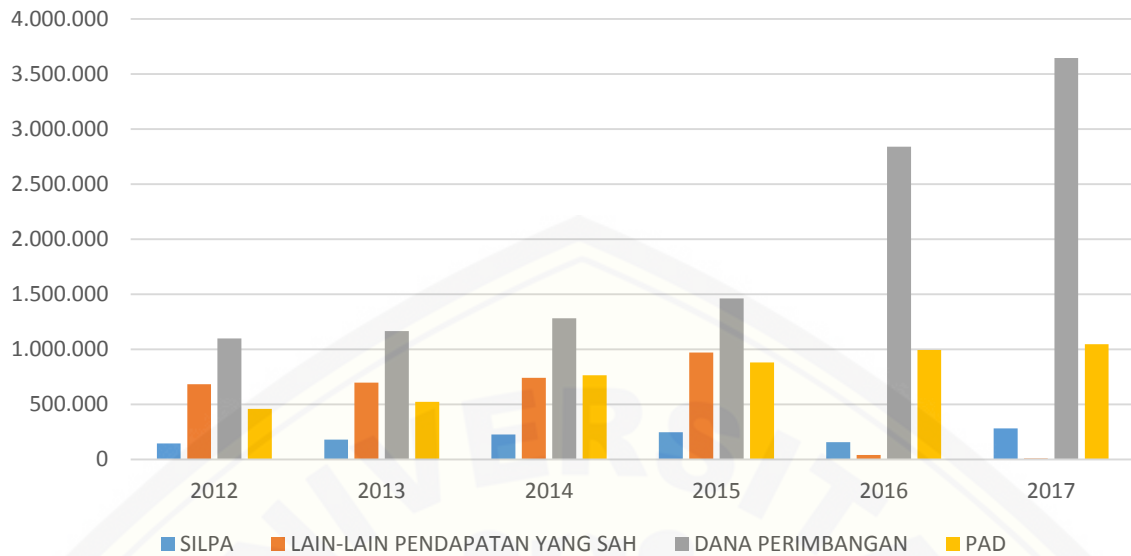
Dalam pelaksanaan pembangunan, aspek keuangan merupakan dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya. Masalah keuangan merupakan hal pokok yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah terutama berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri yaitu seberapa besar daerah tersebut dalam menggali sumber-sumber keuangannya untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa bergantung terhadap bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh suatu daerah. Berkaitan mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah PAD menjadi acuan dalam mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Selain karena PAD merupakan pendapatan murni yang diperoleh daerah karena penggalan potensi keuangan yang ada di daerah dan pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Saputra dan Fernando, 2017).

Menurut Halim (2001) dalam melihat kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat dilihat melalui PAD terhadap total pendapatan daerah. Sehingga dapat diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah dalam memberikan pelayanan



publik kepada masyarakat. Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam Gambar 1.1 yang menunjukkan komposisi realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2012-2017. Berdasarkan data yang diperoleh proporsi dari total penerimaan daerah terbesar bersumber dari Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah kemudian diikuti dengan PAD dan SiLPA. Dimana, Dana Perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012-2015 peningkatan Dana Perimbangan sebesar 3,04%, 5,01% dan 6,98%. Tetapi pada tahun 2015-2016 realisasi Dana Perimbangan meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 47,12%. Serta Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2016-2017 menurun sebesar 47,90% dan 38,91%. Sedangkan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi, pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebesar 7,02%, 22,95% dan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan sebesar 7,80%, 6,40% dan 2,63%.

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan kemampuan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam dalam membiayai kebutuhan keuangannya dan kemampuan kinerja keuanagan daerah yang belum optimal dikarenakan dengan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih lebih rendah dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama kurun waktu 2012-2017. Sehingga dapat diindikasikan bahwasannya tingkat ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap dana pihak ektern masih tinggi (Suci dan Asmara, 2014). Namun pada kenyataannya di daerah-daerah masih banyak yang bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dibandingkan berusaha menggali pendapatan dari sumber pemerintah daerah melalui potensi yang tersedia. Tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah menjadi aspek penting dalam mengetahui terlaksananya kewenangan desentralisasi fiskal (Saputra dan Fernando, 2017).



Gambar 1.1 Komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2017

Sumber: DJPK, 2018 diolah

Pembentukan provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri berdasarkan otonomi daerah dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dimana setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kemandirian yang berbeda. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2011-2017 dalam Lampiran 1, menunjukkan seluruh kabupaten dan kota rata-rata memiliki proporsi Dana Perimbangan lebih besar dari PAD dalam pendapatan yang diperoleh daerah.

Sejalan dengan mulai diberlakukannya kebijakan otonomi daerah peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Peran ini dimulai dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah mengenai seluruh pelaksanaan program yang telah di anggarkan dalam APBD. Dimana dalam APBD sendiri berisi tentang gambaran perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran serta perhitungan atas perkiraan dan realisasi pendapatan daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran tertentu (Mamesah, 1995). Berdasarkan undang-undang otonomi daerah penerimaan yang diperoleh pemerintah melalui rekening kas umum

daerah, dimana menambah ekuitas dana dan daerah tidak perlu membayar kembali. Adapun pendapatan yang digunakan untuk memenuhi APBD berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Melalui APBD diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat optimal sehingga meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Tabel 1.1 kita dapat melihat komposisi APBD provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2012-2017, dimana dalam setiap tahunnya belanja daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari Dana Perimbangan, PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri pemerintah masih belum dapat mengoptimalkan peran PAD dalam memenuhi anggaran belanja daerah, dimana pemerintah daerah masih memerlukan sumber dana dari pihak lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah selama kurun waktu 2012-2017, komposisi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sehingga dapat diindikasikan bahwasannya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pihak ektern masih tinggi. Dengan kata lain Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum dapat dikatakan daerah yang mandiri. Karena suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila memiliki kemandirian dalam sisi keuangan daerah (Saputra *et al*, 2015). Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diketahui melalui penerimaan PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD). Pada dasarnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Karena, apabila PAD tinggi maka dapat mendanai pengeluaran daerah khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterahkan masyarakat daerah tanpa bantuan Dana perimbangan yang mengindikasikan daerah tersebut mandiri dalam hal keuangan (Wati dan Martin, 2017). Dalam penelitian Sidik (2002) di era otonomi daerah PAD harus menjadi sumber penerimaan utama. Karena sumber

pendapatan yang bersal dari pihak lain akan mengalami fluktuatif diluar kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Komposisi APBD provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017

TAHUN	BELANJA DAERAH	PENDAPATAN DAERAH			
		SILPA	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	DANA PERIMBANGAN	PAD
2012	2.164.356	145.649	683.265	1.098.995	458.794
2013	2.375.666	179.265	698.390	1.165.849	523.201
2014	2.688.933	227.764	741.467	1.282.745	763.301
2015	3.328.496	248.469	971.432	1.461.922	882.315
2016	3.702.912	158.726	40.710	2.839.658	995.186
2017	4.634.876	282.629	9.029	3.643.693	1.047.492

Sumber : DJPK, 2018 diolah

Adanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat mengoptimalkan peran PAD dalam memenuhi anggaran APBD dikarenakan kemampuan dalam mengelola potensi yang dimiliki masih rendah sehingga dapat mempengaruhi proporsi pendapatan yang akan diperoleh. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki yaitu melalui pertumbuhan ekonominya (Suci dan Asmara, 2014). Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian pada suatu wilayah tertentu dan periode tertentu. Aktivitas perekonomian yang dimaksudkan adalah proses penggunaan faktor-faktor produksi guna menghasilkan *output*, sehingga proses ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan nilai tambah pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya pendapatan, pembiayaan dan belanja. Dari ketiganya pendapatan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama dengan masyarakat dengan menjadi investor atau pekerja guna

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kusumawati dan Wiksuana, 2017). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam Lampiran 2, dimana menunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2012-2017 di Kabupaten/Kota berfluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Adapun penyebab terjadinya fluktuasi adalah berasal dari pendapatan daerah yang lebih didominasi oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Karena jika suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan rendah pula. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang tinggi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan tinggi pula (Suci dan Asmara, 2014).

Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap kemiskinan. Kemiskinan sendiri menjadi salah satu permasalahan sosial mendasar yang masih menjadi pusat perhatian di Indonesia. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja (Berliani K, 2016). Berdasarkan Lampiran 2 selama kurun waktu 2012-2017 persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan melalui persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan perkembangan yaitu dengan menurunnya angka persentase. Namun persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi karena persentase diatas 10% diantaranya sampai tahun 2017 Kabupaten Sumba Timur yang memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 31.03% dan persentas terendah yakni di Kota Kupang sebesar 9.81%.

Berdasarkan tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dan memenuhi urusan rumah tangganya dimana ketika kemampuan keuangan daerah

akan terwujud dan akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketika PAD lebih rendah dibandingkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat. Tetapi, pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui pertumbuhan PDRB setiap tahun selalu berfluktuasi dan Persentase penduduk miskin yang menunjukkan perkembangan yaitu dengan semakin menurun disetiap tahunnya walaupun rata-rata masih diatas 10%. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara rasio PAD, rasio Dana Perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana dampak rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris dampak rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bahan evaluasi bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota.

2. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, informasi dan bahan acuan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama diwaktu yang akan datang.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 Konsep Penerimaan Negara

Penerimaan negara atau pendapatan nasional menurut Alfred Marshal menyatakan bahwa deviden nasional merupakan modal dan tenaga kerja dari suatu negara yang dikelola sumberdaya alamnya guna memproduksi suatu netto komoditas baik material, immaterial ataupun jasa. Sehingga berdasarkan definisi tersebut penerimaan negara diperoleh sebagai hasil dari modal dan tenaga kerja. Sudut pandang mengenai penerimaan negara yaitu Alfred marshal hanya memberikan penekanan terhadap produksi barang dan jasa, dengan mengabaikan pertukaran dan konsumsi yang terpenting dalam perekonomian. Dikarenakan dalam suatu produksi tidak terjadi pertukaran dan dikonsumsi maka suatu pendapatan nasional tidak akan bermakna secara signifikan bagi masyarakat suatu negara. Sehingga pendapat ini dilengkapi dengan asumsi Arthur Cecil Pigou. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwasannya pendapatan nasional tidak hanya mencakup pendapatan yang dihasilkan, melainkan pendapatan yang diperoleh menggunakan uang. Dengan kata lain pendapatan nasional menurut Arthur menyebutkan bahwa jasa yang digunakan untuk diri sendiri, anggota keluarga, atau teman yang tidak menerima pembayaran tidak dikategorikan di dalamnya atau disebut dengan istilah pendapatan objektif masyarakat.

Secara harfiah pendapatan negara merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dan rumah tangga dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu. Adapun konsep penerimaan daerah Produk Domestik Bruto (PDB) dalam ilmu ekonomi dijadikan alat pengukur kinerja perekonomian suatu negara secara keseluruhan (Sukirno, 2000). Dalam konsep pendapatan nasional, salah satunya adalah GDP (*Gross Domestic Product*) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Kesempatan kerja dalam perekonomian akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang dihasilkan. Dimana PDB atas dasar



harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut ini beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional (Sukirno, 2000):

- a. Mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut
- b. Dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya
- c. Dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya, dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya
- d. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah

Konsep dasar wujud dari kenaikan pendapatan negara berasal dari peningkatan perolehan PDB itu sendiri, karena di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat proses kenaikan kapasitas produksi. Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro dan Smith, 2006). Yang dimaksudkan dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara meliputi pajak, retribusi, denda, keuntungan perusahaan, sumbangan masyarakat, dsb (Syamsi, 1994). Sehingga sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua golongan yakni pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

### 2.1.2 Konsep Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan

tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan Produk Domestik Regional Bruto daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Regional. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah Universitas Sumatera Utara tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Sumber- sumber PAD terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

guna memajukan daerah tersebut, yaitu diperoleh dengan suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara bagi para pengguna jasa-jasa negara, atau dapat dikatakan retribusi daerah merupakan sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerimaan yang berasal dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan yang dapat diandalkan oleh daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian, penduduk, stabilitas nasional dan teknologi. pengertian retribusi dalam istilah asing disebut dengan *use carge, use fase* atau *charging for service*. Adapun retribusi daerah berbeda karakteristik dengan pajak daerah. Dimana, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut.

## 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga kemandirian pemerintah daerah meningkat. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari dinas daerah dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut objek pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik negara/BUMD dan penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau sekelompok masyarakat.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan

mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Serta asas yang mendukung desentralisasi fiskal ini sendiri adalah Dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepada daerah terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Pendapatan yang tergolong dalam Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :

1) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sarana dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dalam mendanai kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasinya. Pemberian DAU sendiri lebih diprioritaskan kepada daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Sebaliknya, untuk daerah yang sudah memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga dalam menjalani era otonomi sekarang diharapkan dengan adanya DAU dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah.

## 2) Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK ditujukan bagi daerah khusus yang dipilih untuk tujuan khusus. Penentuan besarnya DAK dilakukan pemerintah dengan menetapkan beberapa kriteria dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah, memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah serta mempertimbangkan kriteria teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Oleh karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat demi tujuan nasional.

## 3) Dana Bagi Hasil

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah menurut persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yakni DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Pada dasarnya setiap daerah memiliki sektor unggulan tersendiri dalam hal keuangan serta hal ini sangat bergantung ada pemerintah daerah sendiri dalam menggali dan menembangkan potensi yang dimiliki. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

#### 4) Pendapatan Lain-lain

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Dana Darurat dialokasikan oleh pemerintah dimana dananya berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

#### 2.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan terhadap pembangunan perekonomian dimana terjadi penambahan nilai (*added value*) didalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan serta terjadi proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lain. Selain itu, dalam pertumbuhan ekonomi persentase pertumbuhan output harus lebih tinggi dari persentase pertumbuhan penduduk dan dalam jangka panjang proses pertumbuhan terus berlanjut. Dimana berdasarkan konsep tersebut pertumbuhan ekonomi harus berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri (Tarigan, 2009).

Menurut konsep diatas pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi ini menyatakan bahwasannya ketika barang modal telah mencapai kondisi kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, antara rasio modal dengan produksi (*capital output/COR*) nilainya tetap dengan perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y=C+I$ ).

Apabila konsep pertumbuhan ekonomi ini dihubungkan dengan penelitian yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dalam lingkup regional atau daerah maka pertumbuhan PDRB akan ditentukan oleh rasio tabungan daerah dan rasio modal-*output* daerah secara bersamaan. Sehingga menurut Harrod-Domar penyisihan suatu proporsi tertentu dalam setiap perekonomian yang berasal dari

pendapatan daerah tidak hanya untuk mengganti barang modal yang rusak. Tetapi, dalam menumbuhkan perekonomian perlu adanya investasi-investasi sebagai tambahan untuk stok modal. Berdasarkan konsep diatas, pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar sesuai dengan penelitian karena sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memiliki tujuan dalam kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perolehan daerah sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Slavinskaité (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dinegara-negara dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi memiliki kekuatan besar untuk mengontrol pendapatan dan pengeluarannya sendiri dibandingkan dengan negara yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah.

Berdasarkan teori ini pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan faktor-faktor produksi yakni dari unsur akumulasi kapital, pertumbuhan penduduk, besarnya *output* yang saling berinteraksi dan kemajuan teknologi. Menurut Solow-Swan terdapat banyak hal mekanisme pasar dalam menciptakan keseimbangan, sehingga tidak perlu terlalu banyak campur tangan dari unsur pemerintah di dalamnya. Adapun bentuk keterlibatan pemerintah adalah sebatas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam model ini terdapat fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal tenaga kerja yang disebabkan dalam model Solow-Swan fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusiantara tenaga kerja (*labor*) dan kapital (*capital*). Sehingga, model yang dihasilkan dalam pertumbuhan ekonomi kurang restriktif. Tingkat pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga sumber antara lain bertambahnya penawaran tenaga kerja, akumulasi modal dan peningkatan teknologi. Sedangkan teknologi yang dimaksudkan adalah dilihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas kapital meningkat. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

Berdasarkan konsep teori Solow-Swan menyatakan demi menciptakan kestabilan dalam perekonomian campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga asas ini dapat sejalan dengan penelitian mengenai kebijakan pemerintah yang telah mencanangkan bahwasanya kegiatan

perekonomian diserahkan terhadap pemerintah daerah untuk menggali dan meningkatkan pendapatannya, dimana menurut Adi (2016) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta pemerintah memberikan bantuan berupa kebijakan desentralisasi fiskal yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah.

#### 2.1.4 Konsep Kemiskinan Ragnar Nurkse

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Dimana kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga dapat berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Wini, 2010). Di setiap negara termasuk Indonesia memiliki definisi tersendiri mengenai seseorang ataupun suatu masyarakat yang tergolong miskin. Karena kemiskinan yang dimaksudkan cenderung bersifat relatif di setiap negara misalnya dilihat dari kondisi perekonomiannya, kondisi sosial dan standar kesejahteraan. Secara umum kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu dalam menjamin kelangsungan hidup.

Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang menyatakan bahwa negara miskin itu dikarenakan dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Hal tersebut muncul karena terdapat ketidaksempurnaan pasar, kekurangan modal dan keterbelakangan Sumber daya manusia yang menyebabkan produktivitas rendah. Dimana dengan produktivitas yang rendah berdampak terhadap pendapatan yang ikut rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika kondisi ini terus menerus terjadi dapat mengakibatkan kemiskinan karena modal dalam mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal (Kuncoro, 1997). Dalam gambar 2.1 menunjukkan Lingkaran Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse.



Berdasarkan konsep Ragnar Nurkse kemiskinan ini muncul karena pendapatan yang diterima rendah sehingga akan berdampak terhadap perolehan tabungan dan investasi. Konsep ini sejalan dengan penelitian yang memiliki tujuan kebijakan otonomi daerah akan memberikan kesempatan daerah untuk mengelola daerahnya guna meningkatkan produktivitas yang ada di daerah, karena daerah akan lebih mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dibandingkan dengan pusat. Apabila kebijakan ini dapat berjalan dengan baik maka dengan adanya modal yang dapat diperoleh melalui pendapatan yang diperoleh baik kebijakan desentralisasi fiskal dapat membantu meningkatkan produktivitas yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan daerah serta berimplikasi terhadap tingginya tabungan dan investasi.

Secara sudut pandang ekonomi, kemiskinan merupakan suatu bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dasar. Sehingga terjadi kekurangan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2005).

#### 2.1.5 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Pertumbuhan ekonomi wilayah sendiri merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan dimana terjadi pertambahan nilai di wilayah tersebut (Tarigan, 2009). Adapun indikator utama dalam melihat kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB dapat dihitung menggunakan dua cara yakni atas harga dasar berlaku dan harga konstan. PDRB sendiri jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, dimana berisi seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek yang berperan dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, dengan adanya dana transfer

kepada daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat daerah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan membantu proses pembangunan daerah yang dilaksanakan guna untuk meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Dimana tujuan pembangunan memiliki beberapa sasaran (Sanusi 1987), antara lain :

- a. Usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan merata antar-daerah.
- b. Pembangunan diarahkan sesuai kemampuan seta potensu daerah guna kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan demi terciptanya ikatan ekonomi yang kuat antar daerah dan mengokohkan kesatuan ekonomi nasional.
- d. Membina daerah tertinggal, perbatasan serta kritis dengan program khusus.

Terdapat penelitian mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Bahn dan Linn (1992), berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Dimana hal ini di dukung dengan adanya argumen median vote theory dan fiscal mobility theory. Dimana menurut median vote theory pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat. Dan menurut fiscal mobility theory tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik akan digambarkan melalui mobilitas penduduk antar daerah karena dalam perbaikan kualitas hidup orang akan memilih daerah dengan pelayanan publik yang lebih baik.

#### 2.1.7 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga segala upaya pelaksanaan kegiatan diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya demi terwujudnya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi akan lebih berarti ketika dibarengi dengan pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan yang dimaksudkan adalah yang berkaitan mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Karena ketika suatu pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin membesar antar kelompok masyarakat dapat menyebabkan adanya kemiskinan yang semakin bertambah. Oleh karena itu, orientasi dari pemerataan adalah untuk mengurangi kemiskinan (Rindayati, 2009).

Berkaitan mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal maka telah terjadi perubahan paradigma dalam suatu proses pembangunan. Dimana peran pemerintah pusat yang berpesanan paling besar diarahkan pada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang telah merubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (Departemen Dalam Negeri, 2002). Dimana dengan adanya desentralisasi fiskal memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan penerimaannya. Dan dalam penegluarannya diharapkan lebih mampu dalam membelanjakan anggarannya kepadafasilitas sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Serta dapat memberikan eksternalitas melalui pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan mengurangi kemiskinan (Rindayati, 2009). Karena pada umumnya program pembangunan pemerintah daerah yang diprioritaskan adalah mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya dsentralisasi fiskal diharapkan pemerintah lebih cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat terutama dalam kebutuhan dasarnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pelimpahan kewenangan keuangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah serta yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang menunjukan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yg dilakukan oleh Koyongian *et al* (2017) yaitu melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah, investasi dan

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya secara parsial pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dan secara simultan menunjukkan bahwasannya pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.

Suci dan Asmara (2014) melakukan penelitian mengenai perkembangan kemandirian keuangan daerah sebagaimana ditetapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Serta penelitian yang menganalisis kemandirian finansial dan apakah kemandirian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Saputra *et al* (2015) yang menunjukkan bahwa secara empiris semakin tinggi rasio independensi keuangan lokal maka semakin tinggi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan di bidang kemandirian keuangan itu sendiri. Karena inisiatif dan kemauan serta kerja keras pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan pendapatan dan diperlukan evaluasi terhadap penggunaan dana perimbangan yang diperoleh untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Albehadili dan Hai (2018) melakukan penelitian mengenai dampak negatif dan dampak positif pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan otonomi daerah merupakan sebagai kunci yang akan memberikan kontribusi terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Adapun dampak positif atau negatif yang di timbulkan dari adanya desentralisasi fiskal terletak pada kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam mengolah dan menentukan efektifitas desentralisasi fiskal itu sendiri.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Budi Saputra (2015)	Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Data Panel Sederhana	Hasil menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten dan Kota masih sangat rendah dan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
2.	Wardhana Adhitya (2013)	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, infrastruktur jalan, jumlah penduduk, Daerah kaya, aturan <i>hold harmless</i> sebelum tahun 2009 dan Ketimpangan (Indeks Williamson)	Regeresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU dan DAK infrastruktur jalan berpengaruh positif signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, aturan hold harmes dan variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan
3.	Wati dan Martin (2017)	Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Deskriptif Verifikatif	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

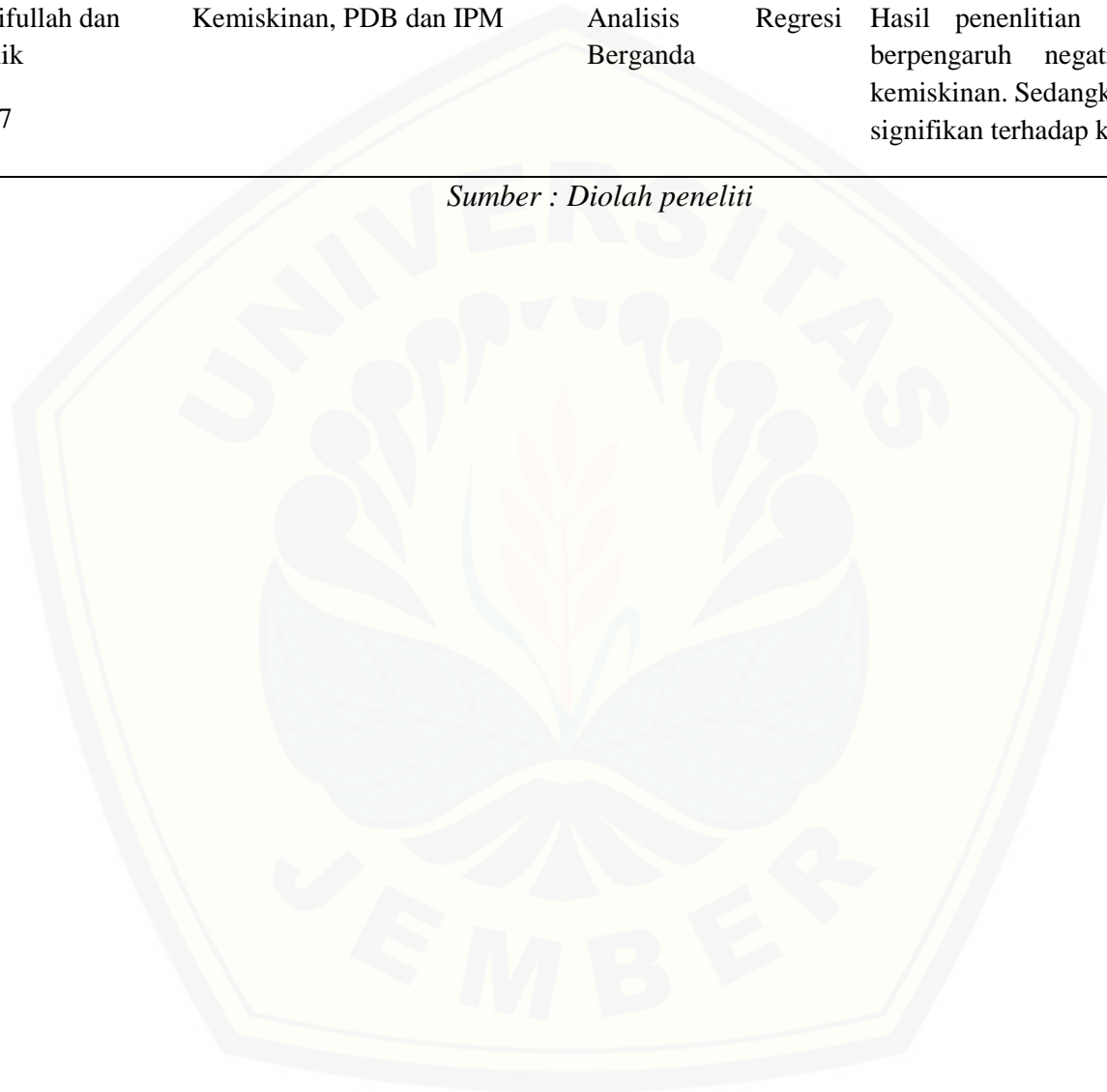
- |    |                                     |  |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| 4. | Gocen Serdal <i>et al</i><br>(2017) | pertumbuhan PDB, tingkat investasi, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perdagangan  | Analisis deskriptif dan regresi data panel                       | Hasil menunjukkan bahwa karakteristik negara memiliki efek signifikan pada desentralisasi fiskal dan hubungan pertumbuhan  |
| 5. | Kusriyawanto<br>(2014)              | PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan DAU                                      | Analisis deskriptif dan Analisis kuantitatif model regresi panel | Hasil menunjukkan ada perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah otonomi daerah diterapkan. Dari sisi pendapatan, otonomi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan bukti empiris juga menunjukkan bahwa ketergantungan provinsi terhadap Transfer Pemerintah Pusat berkurang |
| 6. | Koyongian <i>et al</i><br>(2017)    | Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, Investasi dan jumlah tenaga kerja   | Analisis deskriptif dan Analisis statistik inferensia            | Hasil menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado   |
| 7. | Albehadili dan Hai<br>2018          | Pembangunan ekonomi, pertumbuhan keuangan, faktor penentu lain (modal manusia, stabilitas makroekonomi dan perdagangan internasional), | <i>modern techniques of meta-analysis</i>                        | Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistic, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor umum tertentu lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.  |

- waktu tertentu, pengaruh negara tertentu
8. Huayang *et al* 2017  
 Tingkat desentralisasi fiskal, tingkat desentralisasi keuangan, tingkat interaksi antar keuangan, Tingkat relatifkeuangandesentralisasi, Tingkat relatifdesentralisasi fiskal, rasio pinjaman pemerintah, PDRB, PDB  
 Analisis kuantitatif model regresi data panel  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, semakin tinggi tingkat desentralisasi keuangan, pemerintah daerah dan lembaga keuangan memiliki otonomi yang lebih tinggi sehubungan dengan pusat, skala pembiayaan utang Platform lokal lebih besar; sinergi keuangan lebih kuat
  9. Slavinskaitė 2016  
 PDB perkapita, rasio investasi terhadap PDB, struktur ekonomi , sumber daya manusia - pengeluaran untuk pendidikan, teknologi, PDB per modal kerja  
 Analisis kuantitatif metode regresi berganda  
 Hasil menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan rendah untuk negara berkembang dan tidak berpengaruh terhdap negara maju. Karena desentralisasi fiskal tidak selalu menjadi instrument utama dalam pembangunan ekonomi, yang mana tingkat pembangunan ekoniomilah yang sangat penting dalam proses re-desentralisasi
  10. Suci C dan Asmara A 2014  
 Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah dan PDRB  
 Regresi Data Panel  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

- |     |                              |                         |                   |         |  |
|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--|
| 11. | Syaifullah dan Malik<br>2017 | Kemiskinan, PDB dan IPM | Analisis Berganda | Regresi | Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya IP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. |
|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--|

---

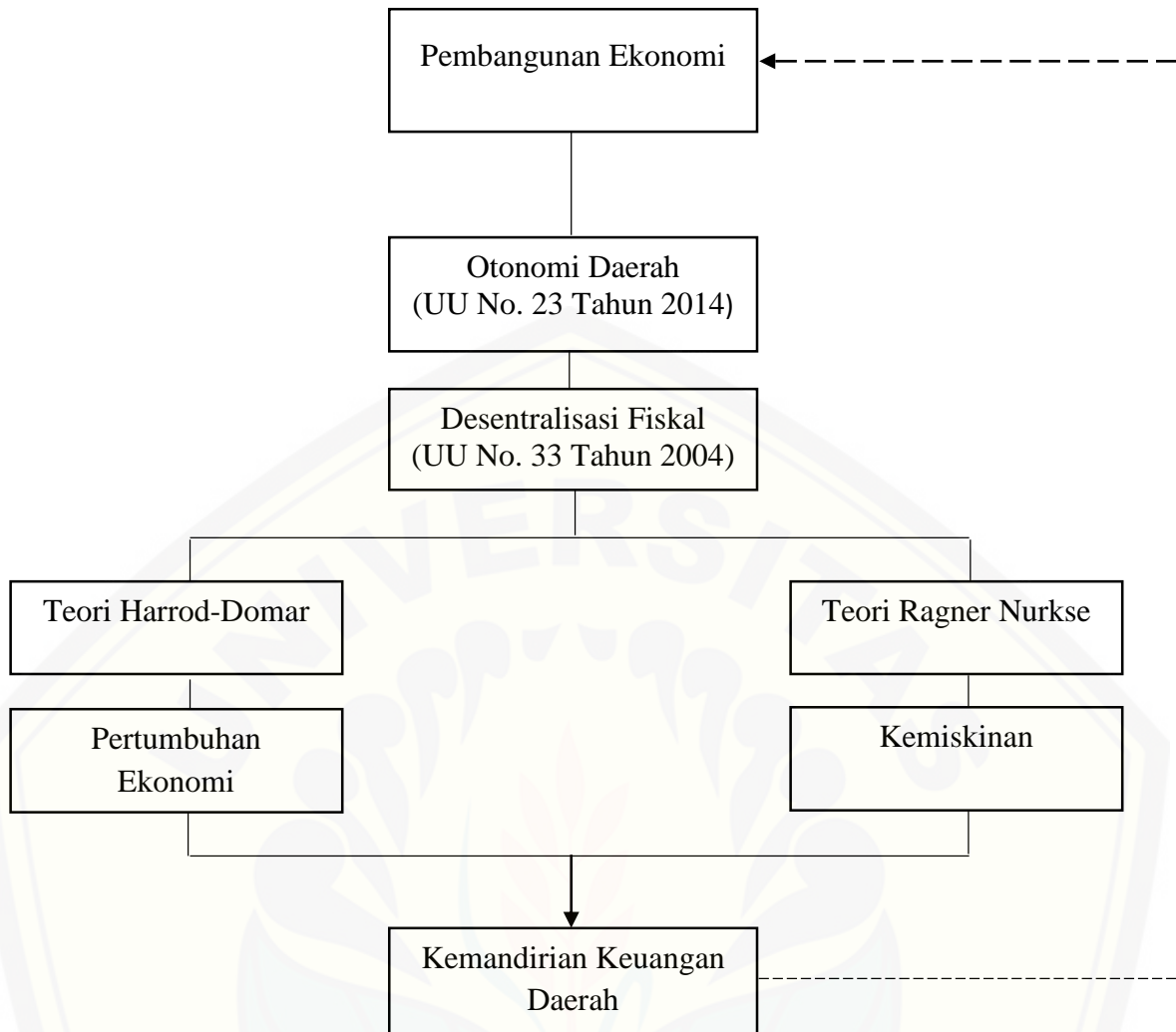
*Sumber : Diolah peneliti*





### 2.3 Kerangka Konseptual

Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan yaitu kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya di daerah otonom tujuan yang diharapkan sulit dicapai. Pelaksanaan desentralisasi fiskal masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, kemandirian keuangan yang belum meningkat serta tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan adanya fenomena tersebut dijadikan sebagai acuan analisis untuk melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan analisis deskriptif guna mengetahui kemampuan dan karakteristik keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis data panel yang digunakan untuk melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2

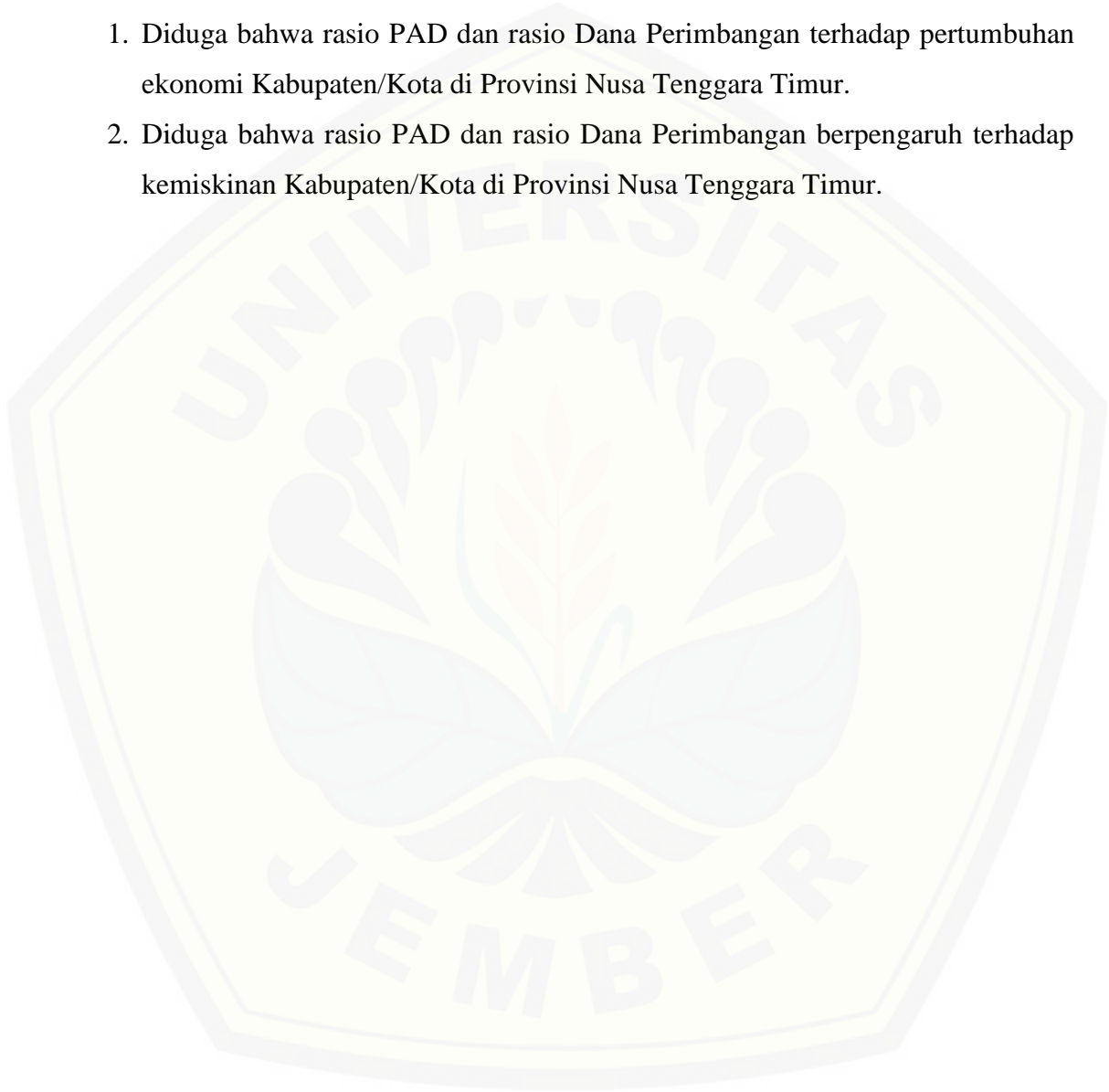


Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2007). Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Diduga bahwa rasio PAD dan rasio Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini akan dibahas perihal metode penelitian yang digunakan guna menentukan pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melakukan estimasi pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi-instansi terkait.

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan *eksplanatory research*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang digunakan dengan unit yang sedang diteliti antara fenomena yang sedang diuji. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan *explanatory research* merupakan jenis penelitian yang berupaya untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 2007).

##### 3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 2012-2017. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut perekonomian di Nusa Tenggara Timur mengalami komposisi persentase PAD terhadap total pendapatan daerah selama kurun waktu 2012-2017 lebih rendah. Tetapi, dalam kurun waktu 2012-2017 persentase pertumbuhan ekonomi meningkat dan kemiskinan semakin rendah.

Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabbu Raijua Dan Kota Kupang.

### 3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan data primer yang telah lebih dahulu diolah oleh lembaga pemerintahan atau swasta yang diperoleh dalam bentuk table, grafik, diagram-diagram (Zainuri, 2001). Sumber data yang diperoleh dari instansi terkait permasalahan penelitian yaitu dari Badan Pusat Statistik Bali dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Total Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2012-2017.

### 3.1.4 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi yang terdapat dalam suatu penelitian terdiri dari kumpulan individu atau obyek yang memiliki sifat-sifat umum atau disebut dengan *universe* (Taniredja dan Mustafidah, 2012). Perumusan populasi terdiri dari semua obyek atau kejadian yang dirumuskan secara jelas dan dalam lingkup yang besar sehingga menjadi sasaran generalisasi. Populasi sendiri dapat berupa wilayah, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa dan lain sebagainya. Dimana dari adanya kumpulan-kumpulan obyek ini dapat dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian.

#### b. Sampel

Sampel merupakan sebagai bagian atau rangkaian dari populasi yang diambil menggunakan cara tertentu dengan berdasarkan karakteristik tertentu, lengkap dan jelas dimana dapat mewakili populasi itu sendiri. Sehingga pengambilan sampel ini menjadi hal yang sangat penting, karena apabila pengambilan sampel kurang tepat atau belum mewakili populasi maka dapat menyebabkan hasil atau kesimpulan yang diperoleh tidak tepat. Sedangkan sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *propotional stratified random sampling*, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Propotional sampling*, merupakan pengambilan sampel dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kategori dalam populasi penelitian. Dimana dalam menentukan sampel dalam penelitian dengan mengambil perwakilan dari setiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota subjek yang berada di setiap kelompok tersebut.
- 2) *Stratified sampling*, merupakan pengambilan sampel dari populasi dengan berdasarkan strata yang memiliki susunan bertingkat. Selain itu cara mengambil sampel dengan memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi.
- 3) *Random sampling*, merupakan pengambilan sampel dimana setiap individu dalam suatu populasi baik secara sendiri ataupun bersama diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Selain itu, dalam penerapannya sampling acak ini dengan cara ordinal yaitu mengambil anggota populasi dari atas ke bawah.

## 3.2 Metode Analisis Data

### 3.2.1 Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Yang mana pada dasarnya data yang digunakan dalam analisis ekonometrika terdiri dari tiga jenis, yaitu data *cross section*, data *time series* dan data panel. *Cross section* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dari banyak individu, sedangkan *time series* merupakan data data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis yang mana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti oleh waktu tertentu (*time series*). Data panel merupakan penggabungan dari data *cross section* dan *time series*.

Adapun dalam penggunaan data panel sendiri memiliki beberapa keuntungan (Baltagi, 2005), yaitu sebagai berikut :

- a. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas beberapa variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved individual heterogeneity*);

- b. Lebih banyak memberikan banyak informasi dan variasi dibandingkan dengan data runtut waktu atau *time series*;
- c. Data panel dapat mengurangi jika terjadi kolinieritas antar variabel, meningkatkan *degree of freedom* , dan meningkatkan efisiensi;
- d. Sangat baik digunakan untuk studi perubahan yang dinamik (*study of dynamic adjectimes* );
- e. Dapat mengukur efek dan mendeteksi dengan lebih baik dibandingkan dengan data deret waktu murni dan kerat lintang murni.

Terdapat beberapa teknik dalam mengestimasi parameter model dengan data panel yaitu *Pooled Least Square*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

1) Model *Pooled Least Square* (*Common Effect*)

Model *Pooled Least Square* adalah model paling sederhana, karena metode yang digunakan hanya dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Asumsi yang digunakan dalam metode ini terbatas dikarenakan mengansumsikan intresep dan koefisien dari setiap variabel sama untuk intresep  $i$  (data *cross section*) yang diobservasi. Sehingga dapat menyebabkan variabel yang diabaikan dapat mengubah intresep *time series* dan *cross section*.

2) Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Dalam pendekatan menggunakan metode ini dapat mengatasi keterbatasan yang ada dalam model *Pooled Least Square* yaitu dengan memasukan variabel *dummy* untuk memungkinkan perbedaan intresep  $\alpha$ . Dalam menggunakan metode ini, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan menggunakan pembobot (*Cross-Section Weight*) atau *General Least Square* (GLS). Dengan menggunakan pembobot ini adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross-section*. Selain itu penggunaan metode ini digunakan untu melihat perilaku perubahan pada data dari setiap variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepestasi data. Untuk menentukan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah dengan melakukan *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu apabila nilai probabilitas yang

dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diputuskan menggunakan *Fixed Effect Model*.

### 3) Model Efek Acak (*Random Effect*)

Pendekatan menggunakan model efek acak dimana parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan kedalam error. Model ini mengansumsikan bahwasannya tidak ada korelasi antara efek individu dan regresor. Terdapat dua komponen dalam model ini, yaitu residual secara menyeluruh dan residual secara individu. Pendekatan penggunaan model ini dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlah seperti yang terdapat dalam model efek tetap. Sehingga dapat mengimpikasikan hasil estimasi menjadi lebih efisien. Untuk menentukan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* adalah dengan melakukan uji *Hausman* dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

Analisis regresi yang digunakan yaitu metode data panel digunakan dalam menjawab rumusan masalah mengenai identifikasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Variabel rasio PAD (RPAD) terhadap total pendapatan daerah dan variabel rasio Dana Perimbangan (RDP) terhadap total pendapatan daerah digunakan sebagai gambaran kemandirian keuangan daerah Dalam model kemiskinan menggunakan proksi indeks ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun estimasi model pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 RPAD_{it} + \beta_2 RDP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)



RPAD = Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)

RDP = Rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah (%)

$\beta_0$  = koefisien regresi

$\beta_1$  = koefisien regresi Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah

$\varepsilon_{it}$  = error term

i = kabupaten/ kota ke-i

t = periode waktu (2012,...,2017)

Adapun estimasi model pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dituliskan sebagai berikut:

$$M_{it} = \beta_0 + \beta_1 RPAD_{it} + \beta_2 RDP_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

M = Persentase penduduk miskin (%)

RPAD = Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)

RDP = Rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah (%)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

$\beta_0$  = koefisien regresi

$\beta_1$  = koefisien regresi Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah

$\varepsilon_{it}$  = error term

i = kabupaten/ kota ke-i

t = periode waktu (2012,...,2017)

### 3.3 Pemilihan Model Data Panel

Setelah parameter estimasi didapat, dilakukan pengujian terhadap parameter estimasi. Pengujian dapat dilakukan juga secara statistik dan dengan pendekatan analisis model data panel.

#### a. Uji Chow

Dengan melakukan uji chow yang digunakan untuk memilih apakah model *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect* yang akan digunakan. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Pooled Least Square* (Restricted)

$H_1$ : Model *Fixed Effect* (Unrestricted)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan  $F_{\text{statistik}}$  dengan  $F_{\text{tabel}}$ . Perbandingannya apabila nilai  $F_{\text{statistik}}$  lebih besar daripada  $F_{\text{tabel}}$  atau  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka dapat menjadi dasar dalam menolak hipotesis nol sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect*, dan sebaliknya (Widarjono, 2005).

#### b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan setelah pengujian Uji Chow. Tujuan dilakukannya uji hausman yaitu untuk memilih model yang terbaik antara model *Random Effect* atau model *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam *hausman test* antara lain :

$H_0$ : Model *Fixed Effect*

$H_1$ : Model *Random Effect*

Dasar penolakan  $H_0$  yang digunakan adalah perbandingan statistik Hausman dengan *Chi-Square* atau juga bisa dilihat dari nilai *p-value* nya. Jika *p-value* lebih kecil dari 5% atau  $F < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik jika dibandingkan dengan model *Random Effect*.

### 3.4 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Uji Normalitas

Dalam prosedur pengujian statistik terdapat asumsi yang didasarkan dalam analisis runtun waktu adalah pada asumsi bahwa faktor kesalahan  $ui$  didistribusikan secara normal (Rosadi, 2012). Prosedur uji normalitas yang tergolong yang sederhana yaitu dengan menggunakan Histogram Residu dan uji Jarque-Bera untuk mengetahui faktor pengganggu sudah berdistribusi secara normal atau tidak. Hipotesis  $H_0$  pada data berdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis nol distribusi normal. Bila nilai Jarque-Bera dan probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau  $JB > \alpha (5\%)$ , maka data berdistribusi normal.

#### 2.4.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel-variabel independen. Karena tidak adanya multikolinearitas merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linear klasik. Seperti dalam Gujarati (2007), selama kolinearitas itu tidak sempurna, estimator OLS masih tetap *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) meskipun salah satu atau lebih koefisien regresi parsial dalam regresi berganda bisa saja secara individual tak signifikan secara statistik.

#### 2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama, jika terjadi kesalahan pengganggu tidak memiliki varian yang sama maka dapat diartikan adanya heteroskedastisitas. Gujarati (2006) menyatakan ketika heteroskedastisitas terjadi, rutinitas pengujian hipotesis yang seperti biasa tidak bias diandalkan karena memungkinkan penarikan kesimpulan yang tidak sesuai.

### 3.5 Pengujian Hipotesis

Dalam suatu pengujian hipotesis, terdapat beberapa uji yang akan dilakukan diantaranya adalah uji koefisien regresi secara keseluruhan (uji-F), uji koefisien regresi secara individual (uji-t) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Untuk membuktikan bahwa koefisien regresi suatu model secara statistik signifikan atau

tidak, perlu dikaji apakah koefisien regresi satu per satu secara statistik signifikan atau tidak dalam memengaruhi nilai variabel tak bebas, juga perlu diuji untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai variabel tak bebas. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas dapat dilakukan dengan Uji Statistik t. Cara yang lebih mudah juga dapat dilihat dari *p-value*. Jika *p-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ , maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Melihat keseluruhan koefisien regresi dapat dilakukan dengan uji statistik F.

a. Uji Statistik F (F-Test)

Yaitu pengujian yang dilakukan secara bersama-sama seluruh variabel bebas yaitu rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka menggunakan uji F dengan cara :

- 1) Menentukan hipotesis yang akan diuji ( $H_0$  dan  $H_a$ ).
- 2) Menentukan *level of significance* ( $\alpha$ ) tertentu.
- 3) Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
- 4) Menarik kesimpulan.

Adapun uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

F : Pengujian secara bersama-sama

$R^2$  : Koefisien determinasi berganda

k : Banyaknya variabel

n : Banyaknya observasi (sampel)

k-1 : Derajat bebas pembilang

n-k : Derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis penelitian ini adalah:

- a) Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- (1)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen (RPAD dan RDP) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).
- (2)  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen (RPAD dan RDP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).
- b) Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan
- (1)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen (RPAD, RDP dan tingkat pengangguran terbuka) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).
- (2)  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen (RPAD, RDP dan tingkat pengangguran terbuka) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).
- b. Uji t (t-test)

Uji t-pasial pada fungsi regresi  $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_e)$  yang bertujuan membuat kesimpulan mengenai pengaruh dari tiap-tiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun dalam penyusunan rumus yang digunakan untuk perhitungan uji t secara parsial (Supranto, 1995):

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana :

t = pengujian secara parsial

$\beta_i$  = koefisien regresi

$Se(\beta_i)$  = *Standar error* dari koefisien korelasi

Perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

- 1) Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- a)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  artinya secara parsial variabel independen (RPAD dan RDP) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

- b)  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  artinya secara parsial variabel independen (RPAD dan RDP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).
- 2) Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan
- a)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  artinya secara parsial variabel independen (RPAD, RDP dan tingkat pengangguran terbuka) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).
- b)  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  artinya secara parsial variabel independen (RPAD, RDP dan tingkat pengangguran terbuka) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).
- c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien regresi bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (uji parsial). Besarnya presentasi pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) persamaan regresi. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1 dengan rincian keterangan

### 3.6 Definisi Variabel Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya permasalahan, maka peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa dicerminkan melalui laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga dasar 2010 di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012-2017 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
2. Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. RPAD adalah rasio PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang diterima Kabupaten/Kota per tahun selama kurun waktu 2012-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.
4. RDP adalah rasio Dana Perimbangan terhadap total penerimaan pendapatan yang diterima Kabupaten/Kota per tahun selama kurun waktu 2012-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah tingkat penyerapan angkatan kerja terhadap pasartenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.

## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2012-2017 dengan variabel penelitian Rasio PAD (RPAD), Rasio Dana Perimbangan (RDP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Hasil pengujian regresi data panel atas rasio PAD dan rasio dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio PAD dan rasio dana perimbangan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan rasio PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dan rasio dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga untuk jangka panjang ketika tingkat ketergantungan pemerintah daerah rendah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pemerintah daerah akan lebih berfokus pada pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah guna meningkatkan PAD dan meningkatkannya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan output perekonomian.
2. Hasil pengujian regresi data panel atas rasio PAD dan rasio dana perimbangan terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya ketika rasio PAD yang meningkat akan mengurangi kemiskinan. Peningkatan rasio dana perimbangan akan mengurangi kemiskinan, karena pembiayaan yang masih memerlukan pihak ekstern ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang masih berfokus menjadikan Nusa Tenggara Timur memiliki komoditas unggulan tertentu. Serta penelitian ini menunjukkan bahwa TPT yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka yang perlu disarankan dari hasil penelitian berikut adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan semakin meningkatnya rasio PAD dan rasio dana perimbangan khususnya untuk daerah yang memiliki pertumbuhan PDRB terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu seperti Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Timur Tengah. Selain itu, hal yang perlu dikurangi adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dengan dibarengi dengan kebijakan yang tepat agar tidak mengganggu kinerja pemerintah dan sesuai tujuan dari adanya dana perimbangan dalam jangka panjang dapat mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah dan dapat membantu atau mendukung dalam proses pembangunan. Tetapi masih menjadikan PAD sebagai sumber utama pembiayaan dalam pembangunan.
2. Peningkatan rasio PAD yang ternyata mengurangi persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan teori David Ricardo menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang terlalu besar maka dapat menimbulkan melimpahnya angkatan kerja. Dimana pada saat itu pemerintah daerah belum dapat memenuhi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap angkatan kerja sehingga pengangguran akan semakin bertambah dan akan berdampak terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan selain berfokus terhadap peningkatan komoditas unggulan daerah kebijakan pemerintah daerah melalui pembangunan sektor ekonomi ditingkatkan dengan memberikan bantuan modal bagi industri padat karya, mengadakan pelatihan kerja, dan lain-lain. Kebijakan pengurangan kemiskinan ini dapat dilakukan diberbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang rata-rata masih memiliki persentase penduduk miskin yang cukup tinggi terutama dilakukan wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sabu Raijua.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, P. H. 2016. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Ani, N. L. N. P. dan A. A. N. B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–97.
- Albehadili, A. F. S., dan L. X. Hai. 2018. Impacts of Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Meta Analysis Approach. *International Journal of Management Science and Business Administration*. Volume 4, Issue 5.
- Akai, N dan M. Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State Level Cross Section Data For The United States. *Journal of Urban Economics*, Vol. 52, 93 – 108, 22 Maret 2018.
- Ardi, H. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Simposium Nasional Akuntansi 11. Jakarta: Universitas Trunojoyo.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Statistik Pusat Indonesia*. Jakarta: BPS Pusat.
- \_\_\_\_\_ . 2012. *Pengangguran*. Jakarta: BPS Pusat.
- \_\_\_\_\_ . 2018. *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka*. NTT: BPS NTT.
- \_\_\_\_\_ . 2018. *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota 2012-2017*. NTT: BPS NTT.
- \_\_\_\_\_ . 2018. *Produk Domestik Regional Bruto*. NTT: BPS NTT.
- \_\_\_\_\_ . 2019. *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota 2012-2017*. NTT: BPS NTT.
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Bahl, R. W., dan J. Linn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York Oxford University Press.
- Basuki, T dan Immamudin, Y. 2016. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Berliani, K. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*. Vol.2 no.1.

- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Enceng, B. I. Liestyodo, dan M. W. Purwaningdyah. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 12(1):1-73.
- Febiandani, R., dan D. A. Suseno. 2016. Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*. Vol 5 No 1.
- Damodar N. Gujarati. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga, Hal. 82-104.
- DJPk Kementerian Keuangan. 2017. LGF Realisasi Anggaran 2012-2017. DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
- Gocen, S., A. Bayhanay, dan N. Goktas. 2017. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Theory and Application. MPRA Paper No. 84523.
- Gujarati, D. N. 2003. *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Halim, A. 2008. Auditing (Dasar Dasar Audit Laporan Keuangan). Edisi Keempat. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Huayang, Y., Z. Di dan C. Bing. 2017. The contribution of fiscal/financial decentralization to the debt expansion of the local financing platform. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*.
- Koyongian, C. L., P. Kindangen dan G. M. Kawung. 2017. Pengaruh Pengeluaran pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan daerah*. [Vol 19, No 4](#).
- Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Kusriyawnto. 2014. Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010. Volume 2 Nomor 7 hlm 111-123.
- Lestari, R. P. 2017. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Prespektif Islam Tahun 2011-2015.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Melalolin, M. L., A. T. Naukoko dan A. L. Ch. P. Lopian. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 03.
- Mufid, F. C. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ningrum, S. S. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2.
- Nguyang, H. P., 2008. What is in it for the poor? Evidence from fiscal decentralization in Vietnam. *Munic Personal Repec Archive*. 9344:68-90.
- Nugroho, P. A. 2014. Pengaruh Pdrb, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, H. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Putra, R. dan S. Hidayat. 2016. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. [\*Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah\*](#). Vol 3 No 4. Prud'homme, R. 1995. On The Danger of Decentralization. *The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252*. Washington DC.
- Rindayati, W. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rochjadi, A. 2006. *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Rosandi, D. 2012. Ekometrika Dan Analisis Runtut Waktu Terapan.:CVANDI OFFSET. Yogyakarta.

- Sadono, Sukirno. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sanga, K. P., S. B. Hermanto, dan N. Handayani. 2018. Pengaruh penerimaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel interving 2018. Konferensi regional akuntansi V.
- Sanusi, A. (1987). Apa yang membuat IKIP Kita IKIP. Bandung: IKIP Bandung.
- Saputra, B. dan R. Fernando. 2017. Kontribusi sumber-sumber PAD dalam emndukung kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5 no.3.
- Saputra, B., Y. V. Amzar, dan P. H. Prihanto. 2015. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*. Vol.10 No. 02.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah di sampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah*. Bandung. 10 april 2002.
- Slavinskaitė, N dan R.Ginevičius. 2017. Revenue Autonomy Of Local Government: Fiscal Decentralization Aspect. *International Scientific Conference Business and Management*.
- Suci, S. C. dan A. Asmara. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol 3 No 1.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriy, A dan A. Halim. 2003 . Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Suryawati. 2005. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Susanti, S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18.
- Tangkilisan, H. N. S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
- Syaifullah, A. Dan N. Malik. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Asean-4 . *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 1 Jilid 1.

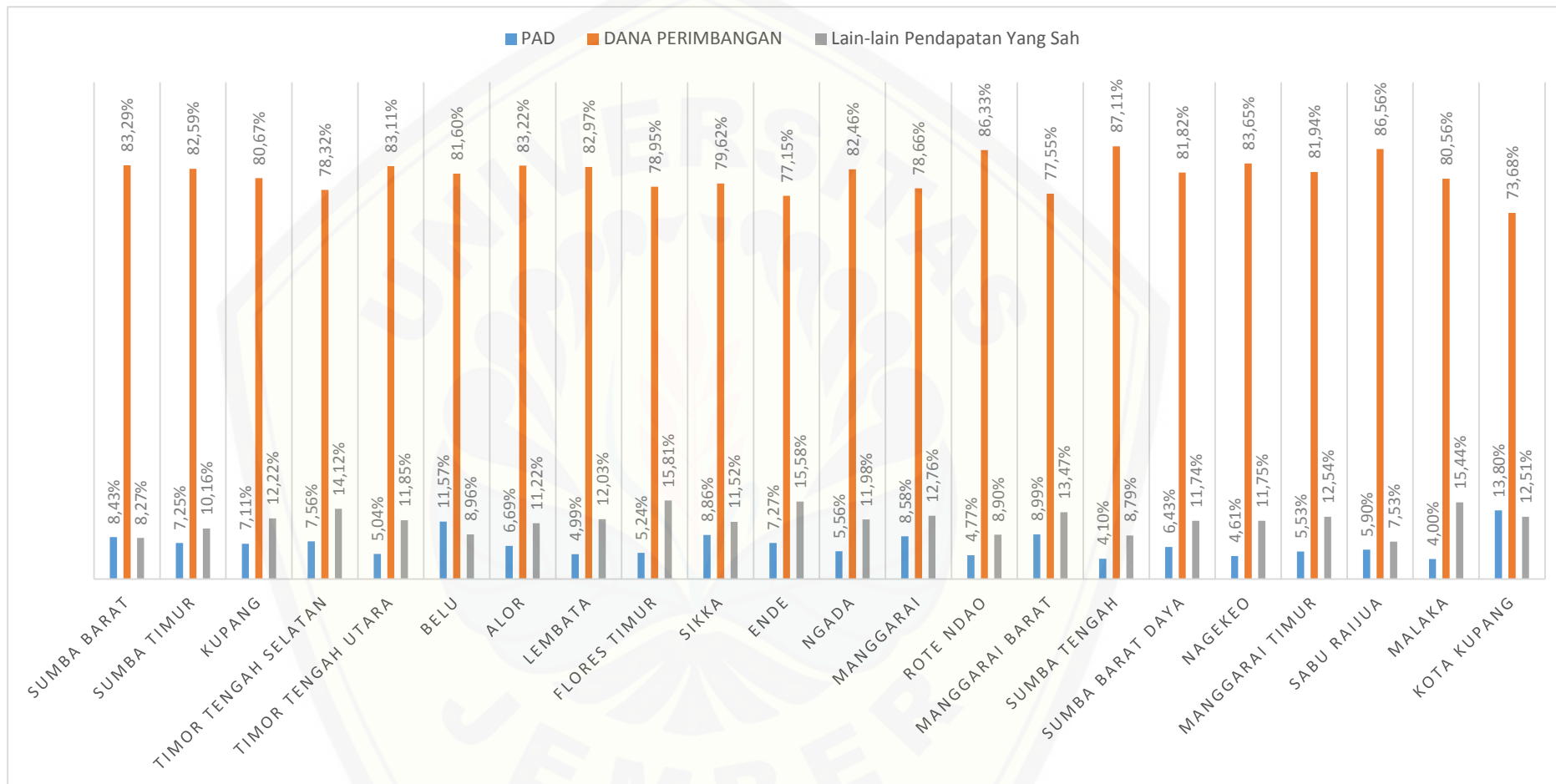
- Syamsudin, B. T. Cahya dan S. N. Dwi. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Sumber Daya*. Vol.17 No.1
- Tarigan, R. 2009. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
- Wati, M. R. Dan C. Martin. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 63-76.
- Wardhana, A., B. Juanda, H. Siregar dan K. Wibowo. 2013. Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 15, No 2.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaja, A. W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wini, H. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). *Thesis*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

World Bank Group Flagship Report. 2016. "Global Economic Prospect: Spillovers amid Weak Growth". World Bank Group. Tersedia di <http://www.worldbank.org>, diakses pada 2 Mei 2019.

Yustika, A. E. 2008. Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi. Malang : Bayu Media Publishing.



**LAMPIRAN 1** Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017



Sumber : DJPK, 2018 (Diolah)



**LAMPIRAN 2**

Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012-2017

Kabupaten/Kota	2012		2013		2014	
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)
Sumba Barat	5,03	29.56	5,16	29.35	4,76	27.79
Sumba Timur	5,08	30.30	5,07	30.08	4,99	27.63
Kupang	5,04	20.10	5,07	19.96	5,1	19.05
Timor Tengah Selatan	4,18	27.49	4,25	27.30	4,36	26.79
Timor Tengah Utara	4,42	21.53	4,4	21.37	4,58	20.89
Belu	5,28	14.52	6,04	14.42	5,57	14.24
Alor	4,84	20.03	4.24	19.88	4.80	19.48
Lembata	4,77	24.74	4.96	24.56	5.09	22.32
Flores Timur	4,41	9.12	4.82	9.06	4.84	7.83
Sikka	3,91	12.81	4.20	12.72	4.56	12.27
Ende	5,26	20.68	5.33	20.53	5.01	20.37
Ngada	6,21	11.33	5.09	11.25	4.83	10.76
Manggarai	5,27	21.49	5.43	21.33	5.11	20.22
Rote Ndao	4,43	29.07	4.25	28.86	4.85	26.85
Manggarai Barat	3,83	18.87	4.49	18.74	4.08	17.20
Sumba Tengah	4.17	32.05	4.39	31.82	4.22	31.40
Sumba Barat Daya	6.47	27.67	5.54	27.47	4.02	25.78
Nagekeo	4.43	12.16	4.54	12.08	4.59	12.02
Manggarai Timur	6	24.56	5.34	24.38	5.27	24.01
Sabu Raijua	6.25	32.61	5.04	32.37	5.14	29.48
Malaka	4.74	-	5.65	-	5.08	-
Kota Kupang	7.52	9.39	7.20	9.33	6.81	8.70
Nusa Tenggara Timur	5,46	20.41	5,41	20.41	5,05	19.60

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2018 (Diolah)

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017	
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Persentase Penduduk Miskin(%)
Sumba Barat	4,8	30.56	5	29.34	5,03	29.28
Sumba Timur	5,03	31.74	5,06	31.43	5,14	31.03
Kupang	5,05	23.37	4,83	23.43	5,13	22.91
Timor Tengah Selatan	4,39	31.12	4,79	29.89	5,35	29.44
Timor Tengah Utara	4,7	25.20	4,84	24.07	5,09	23.52
Belu	5,34	16.81	5,76	15.82	5,81	15.95
Alor	4.86	22.92	4.58	22.35	4.88	21.67
Lembata	4.98	27.13	4.75	26.26	5.04	26.48
Flores Timur	4.61	9.66	4.77	10.31	5.16	10.75
Sikka	4.40	14.28	4.93	14.33	5.22	14.20
Ende	5.07	23.49	5.08	23.89	5.04	23.95
Ngada	4.69	12.81	5.18	12.69	4.94	12.77
Manggarai	5	23.18	5.09	22.50	5.12	21.91
Rote Ndao	5.06	30.49	5.13	29.60	5.48	28.81
Manggarai Barat	4.45	20.12	4.76	19.35	5.11	18.86
Sumba Tengah	4.79	36.22	4.82	36.55	4.92	36.01
Sumba Barat Daya	4.63	30.01	5.02	30.63	5.52	30.13
Nagekeo	4.61	14.38	4.55	13.61	4.96	13.48
Manggarai Timur	5.10	28.64	5.16	27.71	5.14	26.80
Sabu Raijua	5.04	33.17	5.07	32.44	5.11	31.07
Malaka	4.90	17.28	5.02	16.66	5.11	16.52
Kota Kupang	6.63	10.21	6.74	9.97	6.83	9.81
Nusa Tenggara Timur	4,92	22.61	5,12	22.19	5,11	21.85

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2018 (Diolah)

## Lampiran 3

## Data yang digunakan dalam penelitian

Kabupaten/ Kota	Tahun	PDRB	PAD	Dana Perimbangan	PPM	IPM	TPT
		Miliaran	Jutaan		Persen		
Sumba Barat	2012	1 024.89	20,844,670,264	331,191,630,269	29.56	59.98	1.86
	2013	1 077.82	23,960,648,245	379,194,161,685	29.35	60.55	3.29
	2014	1 129.10	32,649,628,297	406,171,235,865	27.79	60.9	2.58
	2015	1 183.32	47,398,743,299	462,543,542,450	30.56	61.36	1.8
	2016	1 242.52	60,967,608,812	567,972,414,064	29.34	61.85	2.16
Sumba Timur	2017	1 304.95	85,144,270,411	529,457,071,579	29.28	62.3	3.83
	2012	2 826.64	40,193,740,825	552,125,283,503	30.3	60.89	3.05
	2013	2 969.85	40,056,503,749	607,851,521,177	30.08	61.44	3.76
	2014	3 118	62,609,245,757	648,285,068,399	27.63	62.04	1.69
	2015	3 274.75	66,290,916,752	712,810,225,350	31.74	62.54	3.14
Kupang	2016	3 440.48	68,222,357,518	897,062,773,691	31.43	63.22	2.46
	2017	3 617.31	98,205,464,855	861,868,679,078	31.03	64.19	2.9
	2012	3 421.35	40,539,822,422	574,531,058,413	20.1	60.34	2.54
	2013	3 594.75	42,422,203,005	633,073,878,544	19.96	61.07	3
	2014	3 778.24	58,785,478,561	678,891,118,902	19.05	61.68	1.85
Timor Tengah Selatan	2015	3 968.94	67,270,792,446	824,897,190,785	23.37	62.04	4.15
	2016	4 160.83	73,214,731,552	974,516,327,489	23.43	62.39	3.81
	2017	4 374.11	119,140,353,544	868,290,193,863	22.91	62.79	3.52
	2012	3 459	31,239,720,871	628,069,294,778	27.49	57.94	0.94
	2013	3 606.17	36,327,694,945	726,370,343,563	27.3	58.76	1.35
Timor Tengah Utara	2014	3 763.52	61,898,590,785	753,524,595,749	26.79	59.41	1.69
	2015	3 928.82	76,086,059,849	803,818,808,671	31.12	59.9	3.47
	2016	4 116.98	71,848,806,283	942,431,898,450	29.89	60.37	3.85
	2017	4 337.37	189,534,208,709	980,828,729,334	29.44	61.08	1.7
	2012	2 088.13	17,685,916,306	491,742,585,592	21.53	59.04	1.62
Belu	2013	2 180.04	17,987,044,096	542,565,423,416	21.37	59.56	2.87
	2014	2 279.99	32,029,110,641	592,017,131,798	20.89	60.41	2.2
	2015	2 387.08	36,136,381,128	616,246,049,242	25.2	60.96	1.88
	2016	2 502.50	47,974,079,044	757,385,944,356	24.07	61.54	2.17
	2017	2 629.84	77,782,160,335	788,445,539,509	23.52	62.03	0.6
Alor	2012	2 014.21	41,899,937,605	475,789,088,014	14.52	57.58	2.21
	2013	2 135.80	63,821,368,066	705,405,527,314	14.42	59.12	3.91
	2014	2 254.67	70,227,478,518	452,094,507,017	14.24	59.72	2.96
	2015	2 374.99	72,408,429,832	578,467,976,007	16.81	60.54	5.39
	2016	2 511.90	74,823,080,565	676,380,888,419	15.82	61.04	5.77
Lembata	2017	2 657.74	101,246,072,215	779,291,768,009	15.95	61.44	2.47
	2012	1 441.95	22,348,416,539	497,074,209,461	20.03	56.47	1.64
	2013	1 503.16	31,555,987,910	564,522,356,077	19.88	57.52	2.83
	2014	1 575.30	41,465,105,647	609,421,008,807	19.48	58	3.45
	2015	1 651.91	39,889,986,786	642,478,527,327	22.92	58.5	3.59
	2016	1 727.54	45,718,605,435	796,810,332,954	22.35	58.99	3.73
	2017	1 811.80	81,918,953,312	821,724,201,872	21.67	59.61	1.86
	2012	829.79	21,284,014,969	382,505,950,892	24.74	59.51	4.82
	2013	870.92	22,499,236,777	421,328,067,316	24.56	60.56	3.56
	2014	915.27	28,603,504,696	467,938,432,829	22.32	61.45	6.73
	2015	960.86	28,836,775,343	484,594,485,850	27.13	62.16	3.05

Flores Timur	2016	1 006.51	35,723,669,619	585,761,367,398	26.26	62.81	4.01
	2017	1 057.21	37,992,916,559	564,128,647,041	26.48	63.09	4.18
	2012	2 536.43	29,107,671,570	500,110,271,697	9.12	58.93	5.6
	2013	2 658.76	30,421,157,069	564,175,660,169	9.06	59.8	3.34
	2014	2 787.34	44,528,326,885	614,466,165,945	7.83	60.42	2.41
	2015	2 915.83	47,561,063,030	634,896,792,017	9.66	61.24	3.9
Sikka	2016	3 055.06	50,183,797,225	853,440,070,395	10.31	61.9	2.31
	2017	3 212.69	57,525,204,746	742,819,982,629	10.75	62.89	5.45
	2012	2 396.48	44,856,240,310	507,777,641,620	12.81	60.12	2.8
	2013	2 497.22	50,257,084,173	565,287,346,083	12.72	60.84	3.62
	2014	2 611	78,356,674,460	635,093,431,939	12.27	61.36	5.24
	2015	2 725.79	118,177,114,975	781,738,364,148	14.28	61.81	0.65
Ende	2016	2 860.24	80,269,749,571	872,827,003,719	14.33	62.42	1.87
	2017	3 009.53	77,720,906,943	678,171,446,590	14.2	63.08	2.5
	2012	2 921.23	32,784,891,061	553,585,171,093	20.68	63.93	2.84
	2013	3 077.03	42,292,586,632	585,134,340,961	20.53	64.64	4.52
	2014	3 231.20	61,000,829,123	609,345,018,221	20.37	65.25	2
	2015	3 395.12	59,449,629,993	685,705,727,458	23.49	65.54	3.4
Ngada	2016	3 567.54	68,865,679,023	883,958,867,949	23.89	65.74	2.98
	2017	3 747.31	122,147,222,010	782,964,345,582	23.95	66.11	3.66
	2012	1 641.79	27,892,440,477	399,344,886,424	11.33	63.57	0.76
	2013	1 725.30	30,327,867,805	424,981,017,310	11.25	64.43	1.34
	2014	1 808.63	38,948,646,034	488,009,901,944	10.76	64.64	0.83
	2015	1 893.45	42,585,723,246	550,463,728,714	12.81	65.1	1.32
Manggarai	2016	1 991.54	47,502,339,405	618,741,933,315	12.69	65.61	1.36
	2017	2 090	23,440,076,403	641,449,913,286	12.77	66.47	3.23
	2012	2 128.58	38,170,094,216	464,148,730,459	21.49	58.92	0.92
	2013	2 244.20	46,866,790,827	560,457,637,196	21.33	59.49	1.95
	2014	2 358.86	72,537,773,351	627,007,693,138	20.22	60.08	3.95
	2015	2 476.81	75,149,043,636	749,283,597,068	23.18	60.87	3.99
Rote Ndao	2016	2 602.84	78,284,065,871	818,676,743,696	22.5	61.67	5.51
	2017	2 736.10	128,829,520,073	815,008,601,474	21.91	62.24	4.09
	2012	1 364.97	16,066,719,834	340,478,856,767	29.07	56.56	4.09
	2013	1 422.93	17,646,843,270	445,393,870,722	28.86	57.28	2.48
	2014	1 491.99	25,072,666,421	459,540,119,656	26.85	57.82	4.89
	2015	1 567.48	27,089,991,977	498,894,343,150	30.49	58.32	2.37
Manggarai Barat	2016	1 647.86	28,842,548,099	612,526,648,394	29.6	59.28	2.77
	2017	1 738.15	49,093,660,595	609,383,777,281	28.81	60.51	2.52
	2012	1 616.46	25,751,592,979	409,387,557,165	18.87	58.13	3.37
	2013	1 689.04	34,182,554,705	459,731,150,882	18.74	59.02	1.97
	2014	1 757.87	51,499,162,120	543,011,462,109	17.2	59.64	2.81
	2015	1 836.05	64,742,881,467	590,968,585,859	20.12	60.04	2.36
Sumba Tengah	2016	1 923.40	91,068,685,754	673,248,533,932	19.35	60.63	2.08
	2017	2 021.76	123,431,811,303	694,499,261,725	18.86	61.65	1.3
	2012	542.82	13,179,782,113	295,619,044,810	32.05	58.22	1.19
	2013	566.65	13,434,323,081	314,968,057,584	31.82	59.26	0.48
	2014	590.58	19,270,679,661	370,430,712,338	31.4	59.9	0.25
	2015	618.87	22,023,682,161	409,013,186,050	36.22	57.91	3.81
Sumba Barat Daya	2016	648.72	22,142,086,431	469,107,132,620	36.55	58.52	3.34
	2017	680.65	18,533,042,267	445,353,516,981	36.01	59.39	4.26
	2012	1 650.91	17,746,251,624	395,736,824,837	27.67	56.66	2.89
	2013	1 742.45	16,736,225,912	451,820,372,631	27.47	57.25	2.81
	2014	1 812.41	36,675,146,235	484,286,136,151	25.78	57.6	3.07
	2015	1 896.28	44,191,272,752	590,819,321,650	30.01	60.53	2.87
	2016	1 991.40	43,510,608,957	665,556,523,219	30.63	61.31	2.96

Nagekeo	2017	2 101.30	95,920,806,100	653,264,751,122	30.13	61.46	1.61
	2012	1 000.19	16,758,376,123	379,423,165,162	12.16	61.6	1.62
	2013	1 045.60	15,764,401,083	387,217,864,265	12.08	62.24	1.14
	2014	1 093.55	24,618,925,077	460,557,311,667	12.02	62.71	2.5
	2015	1 143.94	28,618,512,239	519,089,066,897	14.38	63.33	1.95
Manggarai Timur	2016	1 195.96	29,671,653,791	611,055,750,156	13.61	63.93	2.39
	2017	1 255.23	46,129,714,880	576,105,600,035	13.48	64.74	3.6
	2012	1 426.24	15,266,657,498	450,613,814,989	24.56	55.28	2.06
	2013	1 502.45	19,056,499,176	480,374,846,994	24.38	55.74	2.75
	2014	1 581.65	22,053,561,300	508,173,430,457	24.01	56.58	0.37
Sabu Raijua	2015	1 662.33	41,465,748,922	562,154,022,101	28.64	56.83	2.18
	2016	1 748.16	44,112,085,695	691,737,352,809	27.71	57.5	1.34
	2017	1 838	85,878,937,145	684,256,194,414	26.8	58.51	0.5
	2012	555.82	9,316,620,947	281,976,791,858	32.61	50.3	13.41
	2013	583.84	14,497,305,245	340,418,733,725	32.37	51.55	4.83
Kota Kupang	2014	613.86	26,975,204,349	394,324,878,111	29.48	52.51	3.75
	2015	644.8	30,262,370,498	428,347,480,100	33.17	53.28	7.76
	2016	677.51	31,439,614,081	477,474,478,373	32.44	54.16	2.93
	2017	712.13	47,782,615,776	427,354,177,627	31.07	55.22	2.75
	2012	10 609.47	66,068,087,202	525,834,299,798	9.39	76.38	8.38
Kota Kupang	2013	11 373.41	80,729,275,769	611,871,015,686	9.33	77.24	9.05
	2014	12 147.98	113,032,803,507	680,130,315,378	8.7	77.58	11.38
	2015	12 953.37	145,154,792,156	700,571,560,350	10.21	77.95	14.25
	2016	13 826.04	165,449,023,461	926,862,260,026	9.97	78.14	13.71
	2017	14 770.64	229,137,473,529	822,687,901,806	9.81	78.25	12.5

**LAMPIRAN 4****Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model**

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/19 Time: 11:08

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1276.364	1042.583	1.224232	0.2258
RPAD	17172.82	2806.584	6.118761	0.0000
RDP	793.5997	1124.905	0.705481	0.4833

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988418	Mean dependent var	3061.525
Adjusted R-squared	0.985822	S.D. dependent var	3075.995
S.E. of regression	366.2659	Akaike info criterion	14.81726
Sum squared resid	7780742.	Schwarz criterion	15.25995
Log likelihood	-519.4214	Hannan-Quinn criter.	14.99350
F-statistic	380.7446	Durbin-Watson stat	0.840858
Prob(F-statistic)	0.000000		

**LAMPIRAN 5****Hasil Uji Chow (*chow-Test*)**


---

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

---

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	206.929218	(11,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	266.039327	11	0.0000

---

**Hasil Uji Hausman (*Hausman-Test*)**


---

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.463960	2	0.0000

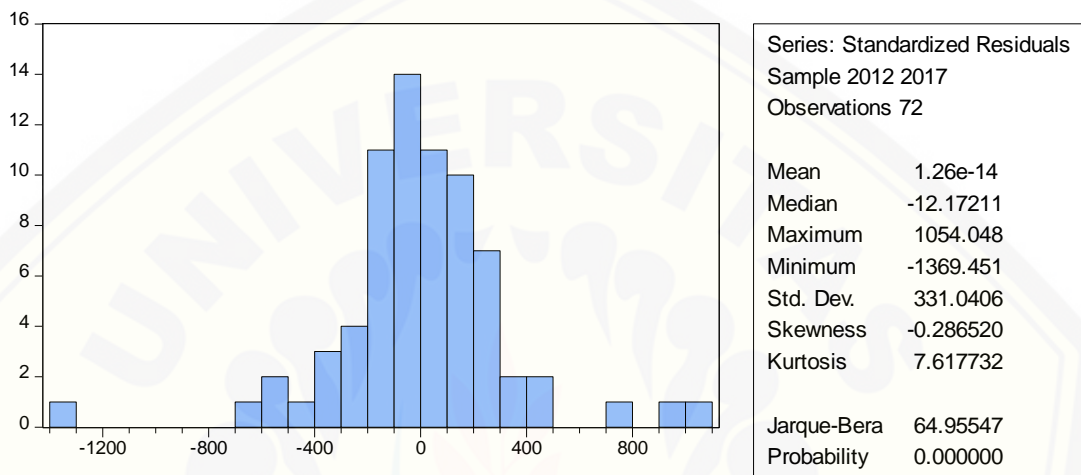
---

**LAMPIRAN 6**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

	RPAD	RDP
RPAD	1	-0.67305447623274
RDP	-0.67305447623274	1

**Hasil Uji Normalitas**



**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/16/19 Time: 11:21  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	103.0856	550.6723	0.187199	0.8522
RPAD	1704.459	1482.383	1.149810	0.2549
RDP	8.341124	594.1530	0.014039	0.9888

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.485043	Mean dependent var	222.5352
Adjusted R-squared	0.369621	S.D. dependent var	243.6566
S.E. of regression	193.4545	Akaike info criterion	13.54063
Sum squared resid	2170630.	Schwarz criterion	13.98331
Log likelihood	-473.4626	Hannan-Quinn criter.	13.71686
F-statistic	4.202361	Durbin-Watson stat	1.582579
Prob(F-statistic)	0.000069		



**LAMPIRAN 7****Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model**


---

Dependent Variable: PPM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/16/19 Time: 12:15  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 72

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.32894	3.285709	11.66535	0.0000
RPAD	-15.27696	8.818684	-1.732340	0.0886
RDP	-19.78049	3.513140	-5.630431	0.0000
TPT	0.224331	0.078554	2.855768	0.0052

---

## Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.979428	Mean dependent var	21.35125
Adjusted R-squared	0.974376	S.D. dependent var	7.140107
S.E. of regression	1.142958	Akaike info criterion	3.288168
Sum squared resid	74.46213	Schwarz criterion	3.762474
Log likelihood	-103.3741	Hannan-Quinn criter.	3.476991
F-statistic	193.8438	Durbin-Watson stat	2.379655
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

**LAMPIRAN 8****Hasil Uji Chow (*chow-Test*)**


---

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

---

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	196.487905	(11,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	263.626224	11	0.0000

---

**Hasil Uji Hausman (*Hausman-Test*)**


---

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.948703	3	0.0300

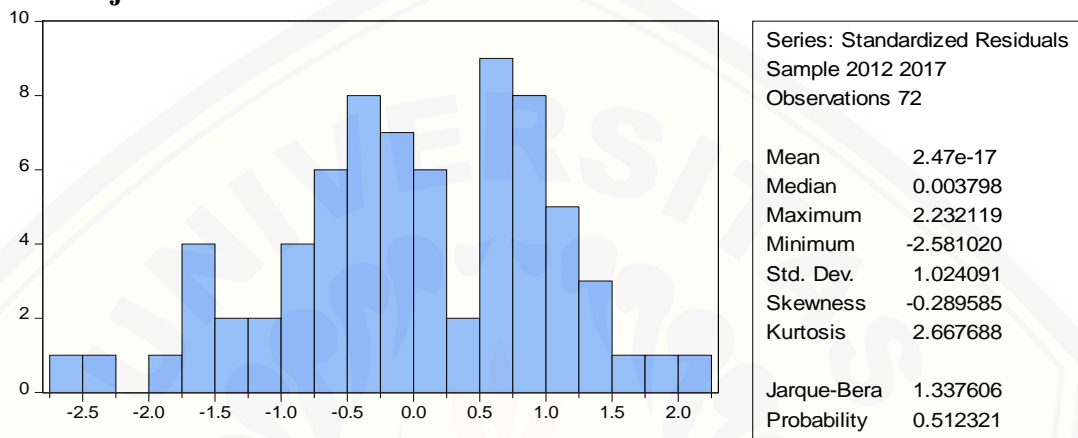
---

**LAMPIRAN 8**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

	RPAD	RDP	TPT
RPAD	1	-0.67305447623274	0.6213744617769296
RDP	-0.67305447623274	1	-0.4292281987468643
TPT	0.6213744617769296	-0.4292281987468643	1

**Hasil Uji Normalitas**



**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/16/19 Time: 12:21  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.524238	1.667192	-0.314443	0.7543
RPAD	0.669776	4.474663	0.149682	0.8815
RDP	1.016660	1.782592	0.570327	0.5707
TPT	0.134970	0.059801	2.256978	0.0279

**Effects Specification**

**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.243762	Mean dependent var	0.825895
Adjusted R-squared	0.058020	S.D. dependent var	0.597538
S.E. of regression	0.579945	Akaike info criterion	1.931285
Sum squared resid	19.17116	Schwarz criterion	2.405590
Log likelihood	-54.52625	Hannan-Quinn criter.	2.120107
F-statistic	1.312367	Durbin-Watson stat	2.268958
Prob(F-statistic)	0.229150		